

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN MELALUI
PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOVYA MUHARRIKA IZZAH RIFAI
A011171005**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN MELALUI
PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NOVYA MUHARRIKA IZZAH RIFAI
A011171005**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA PERIMBANGAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

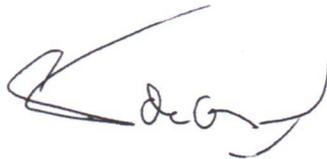
Disusun dan diajukan oleh

NOVYA MUHARRIKA IZZAH RIFAI
A011171005

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 09 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., M.S.E
NIP 19740109 200212 1 001

Pembimbing II



Fitriwati Djam'an, SE., MSi
NIP 19800821 200501 2 002

Ketua departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®
NIP 19690413 1994 03 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA PERIMBANGAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

NOVYA MUHARRIKA IZZAH RIFAI

A011171005

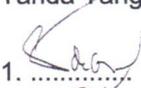
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

pada tanggal **09 Juni 2022**

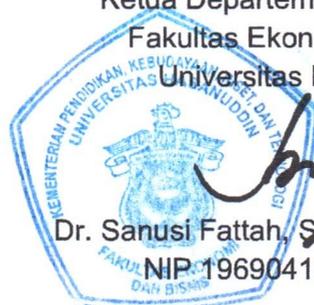
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., M.S.E.	Ketua	1. 
2.	Fitriwati Djam'an, SE., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sanusi Fattah., SE., M.Si., CSF., CMW®	Anggota	3. 
4.	Dr. Retno Fitrianti., SE., M.Si., CMW®	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®
NIP. 19690413 1994 03 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telp. (0411) 583851, 585605 Pswt 2210, 2212, 2607, 2808 Fax. (0411) 587218
Webmail: <http://feb.unhas.ac.id> Email: feb@unhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Novya Muharrika Izzah Rifai**
Nomor Pokok : A011171005
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA PERIMBANGAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 09 Juni 2022
Yang Menyatakan



(Novya Muharrika Izzah Rifai)

No. Pokok: A011171005

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Dengan mengucap puji syukur alhamdulillah kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas segala limpahan hidayah, rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*, beserta keluarga dan *sahabah shahabiyah*. Suri tauladan ummat dalam segala hal, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan kelak mampu memberikan syafaat pada kita semua.

Alhamdulillah atas hidayah inayah-Nya sehingga Skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan”** disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapat dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, penulis mencoba menyajikan karya penulisan yang sebaik-baiknya, namun skripsi ini juga tidak luput dari kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan peneliti.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat kedua orang tua tersayang dan tercinta yang telah sabar dan yakin terhadap penulis, untuk ayahanda Ir. Yarifai Mapeaty, satu hal yang tak pernah terlupakan yang sempat beliau utarakan "*Ayah selalu ada disisimu Nak, sesulit apapun itu selalu ada jalan keluarnya. Meskipun kita berusaha satu tahun lagi*". Terima kasih telah mengucapkan kalimat itu Ayah. Juga kepada ibunda Mardiyana Latief yang senantiasa sabar dan sebagai penyejuk hati Ketika penulis sempat merasa kesulitan. Kepada kedua orang tua tercinta, terima kasih telah banyak mendoakan, mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh keikhlasan, sabar dan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan dan kemuliaan atas semua hal. Kepada saudariku tersayang Leyla Kharunnisa Rifai, S.T dan sahabat, saudara, teman, sekaligus partner bisnis Widya Anggreiny, S.IP yang senantiasa memberikan dukungan hangat, motivasi, semangat, bantuan yang tak terhingga serta menjadi teman berbagi dimasa lapang dan sulit terhadap penulis. Juga kepada saudaraku Muhammad Haikal Thoriq D. Pazangky Rifai, Muhammad Albiruni D. Pazangky Rifai, Muhammad Aidan Thusi D. Pazangky Rifai, dan adinda bungsu Muhammad Aimar Witaro D. Pazangky Rifai yang selama ini membersamai penulis dan memberikan motivasi terbesar. Kepada Bibi, Marliyati, S.E, M.M yang memberikan dukungan dan bantuan materi yang sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan masa studi. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa

dan dukungannya kepada peneliti.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan bantuan baik berupa pikiran dan tenaga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Olehnya itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si, CIPM, CWM®, CRA., CRP. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si., CWM® selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si., Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM® Selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E, M.Si. Selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., M.S.E selaku dosen pembimbing I dan Ibu Fitriwati Djam'an, SE., MSi selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas arahan, bimbingan, saran dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan

skripsi ini serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama proses bimbingan skripsi peneliti secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan kedua dosen pembimbing. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kedua dosen pembimbing.

5. Bapak Dr. Abd Rahman Razak., MS. selaku Penasihat Akademik peneliti yang memberikan bantuan baik berupa arahan maupun motivasi kepada peneliti selama menjalankan studi di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM® dan Ibu Dr. Retno Fitriani, SE., M.Si , CWM® Selaku dosen penguji. Terima kasih telah memberikan waktu, kritik, saran dan motivasi yang membangun dalam penyempurnaan skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, arahan, bimbingan dan nasihat kepada peneliti selama menimba ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Kepada segenap Pegawai Departemen Ilmu Ekonomi, Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan E-Library Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah membantu dalam pengurusan administrasi, persuratan maupun berkas yang dibutuhkan hingga mengikuti ujian.

9. Kepada saudari dan sahabat-sahabatku Dari IE Sampai Surga (DISS) yaitu: Nurul Hikmah, S.E, Rifka Annisa, S.E, Arnida Nur, S.E, Risdianti Putri, S.E, Riskawati, Kamelia Bakri, S.E. Pertama-tama, terima kasih telah menemani dan kebersamaan penulis dimasa lapang maupun sulit selama masa studi. Terima kasih telah menjadi partner terbaik yang senantiasa saling menasihati dalam kebaikan dan terima kasih telah memberikan segenap bantuan baik berupa arahan serta pemikiran yang sangat membantu peneliti. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* senantiasa menjaga dan melindungi kalian dan semoga kita tetap menjalin persahabatan ini hingga di surga kelak.
10. Teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 2017 atau disebut ERUDITE. Terima Kasih atas segala pengalaman selama masa-masa studi. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* memudahkan jalan kita menuju cita-cita masing-masing.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dengan tulus membantu dan memberikan motivasi kepada penulis, terima kasih. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* membalas seluruh jasa-jasa kalian.

Makassar, 1 Mei 2022

NOVYA MUHARRIKA IZZAH RIFAI

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA PERIMBANGAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Novya Muharrika Izzah Rifai
Muhammad Syarkawi Rauf
Fitriwati Djam'an

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh dana perimbangan, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan DJPK Kementerian Keuangan. Adapun data yang digunakan yaitu data time series tahun 2002 sampai 2020 dan dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Model* (SEM) dengan bantuan aplikasi IBM SPSS AMOS 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Adapun indeks pembangunan manusia secara langsung berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE ALLOCATION OF BALANCE FUNDS, HUMAN DEVELOPMENT INDEXES, AND MINIMUM WAGES ON INCOME INEQUALITY THROUGH ECONOMIC GROWTH IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Novya Muharrika Izzah Rifai
Muhammad Syarkawi Rauf
Fitriwati Djam'an

This study aims to analyze the influence of balance funds, human development indices, and minimum wages on income inequality either directly or indirectly through economic growth in South Sulawesi Province. This study used secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of South Sulawesi Province, the Department of Employment and Transmigration, and the DJPK of the Ministry of Finance. The data used is time series data from 2002 to 2020 and analyzed using the Structural Equation Model (SEM) method with the help of IBM SPSS AMOS 22 application.

The results showed that balance funds and the minimum wage did not have a significant effect on income inequality either directly or indirectly through economic growth. The human development index directly affects income inequality and indirectly does not have a significant effect on income inequality through economic growth in South Sulawesi Province.

Keywords: *Income Inequality, Economic Growth, Balancing Funds, Human Development Index, Minimum Wages .*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	II
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	III
PENERIMAAN SKRIPSI	IV
PERNYATAAN KEASLIAN	V
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK	XI
ABSTRACT.....	XII
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR TABEL	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	16
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	17
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 LANDASAN TEORI	19
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan	19
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	24
2.1.3 Dana Perimbangan.....	28
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia.....	30
2.1.5 Upah Minimum	32
2.2 TINJAUAN TEORITIS.....	34
2.2.1 Hubungan Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan	35
2.2.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan Pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi	36
2.2.3 Hubungan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.....	37
2.2.4 Hubungan Pertumbuhan dengan Ketimpangan Pendapatan	39
2.3 HASIL PENELITIAN DAN STUDI EMPIRIS	40
2.4 KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN	44
2.5 HIPOTESIS PENELITIAN.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 RUANG LINGKUP PENELITIAN	47
3.2 JENIS DAN SUMBER DATA	47
3.3 METODE PENGUMPULAN DATA	48
3.4 METODE ANALISIS DATA.....	48
3.5 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54

4.1	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	54
4.2	PERKEMBANGAN VARIABEL PENELITIAN.....	56
	4.2.1 Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan	56
	4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan	57
	4.2.5 Dana Perimbangan di Provinsi Sulawesi Selatan.....	60
	4.2.6 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan	62
	4.2.7 Upah Minimum di Provinsi Sulawesi Selatan	64
4.3	HASIL PENELITIAN	66
4.4	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	73
	4.4.1 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Pendapatan 73	
	4.4.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan	80
	4.4.3 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan	86
	BAB V PENUTUP	90
5.1	KESIMPULAN	90
5.2	SARAN.....	91
	DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Masa Orde Baru dan Reformasi	5
Gambar 1. 2 <i>Grafik Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Antarpulau di Indonesia Tahun 2014-2020</i>	6
Gambar 1. 3 <i>Output (PDRB) Per Provinsi dan Gini Ratio Tiap Provinsi di Pulau Sulawesi 2012-2020</i>	8
Gambar 1. 4 <i>Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan 2002-2019</i>	8
Gambar 1. 5 <i>Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002, 2007, 2013 dan 2020 (rupiah)</i>	10
Gambar 1. 6 <i>Dana Perimbangan dan Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan 2002-2020</i>	13
Gambar 1. 7 <i>Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan 2002-2020</i>	14
Gambar 1. 8 <i>Upah Minimum Provinsi dan Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan 2002-2020</i>	15
Gambar 2. 1 Kurva Lorenz	22
Gambar 2. 2 Kerangka Konsep Penelitian	45
Gambar 4. 1 Gambar Peta administratif Provinsi Sulawesi Selatan.....	54
Gambar 4. 2 <i>Grafik Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2020</i>	56
Gambar 4. 3 <i>Grafik Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2020</i>	65
Gambar 4.4 Gambar Diagram Analisis Jalur Antar Variabel	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002- 2020 (Persen)	58
Tabel 4.2 Dana Perimbangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2020 (Juta Rupiah)	61
Tabel 4.3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2020.....	63
Tabel 4.4 Regression Weights	67
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Pengaruh	70
Tabel 4. 6 Realisasi Penerimaan Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2020.....	74
Tabel 4. 7 Penelitian Terdahulu	76
Tabel 4. 8 Penelitian Terdahulu	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setidaknya ada dua isu penting yang selalu muncul secara bersamaan dalam diskusi mengenai pembangunan ekonomi yaitu, pertumbuhan dan ketimpangan. Analogi yang paling tepat menggambarkan hubungan keduanya, adalah ibarat sebuah benda dengan bayangannya. Seperti dua sisi mata uang yang sama, sehingga mustahil membicarakan pertumbuhan tanpa menyebut ketimpangan. Dalam hal ini, hasil pembangunan dikuasai oleh segelintir kecil orang kaya, sementara orang miskin yang jumlahnya sangat banyak memperoleh bagian yang sangat sedikit. Fenomena ketimpangan ini kemudian melahirkan sebuah idiom yang demikian populer, yaitu, “sedikit menguasai banyak – banyak menguasai sedikit.”

Ketimpangan pendapatan terjadi karena distribusi pendapatan yang tidak merata. Terjadi disparitas antara golongan masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu penyebab terjadinya disparitas yaitu adanya perbedaan karakteristik wilayah. Sebagai sebuah negara yang terdiri dari belasan ribu pulau menjadi konsekuensi adanya disparitas pendapatan yang sulit dihindari, sebab karakteristik wilayah mempengaruhi pola pembangunan ekonomi yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan wilayah untuk tumbuh.

Mimpi buruk pembangunan ini menghantui hampir semua negara di dunia, terutama negara-negara berkembang. Karena pada hakekatnya disparitas pendapatan serta kemiskinan merupakan dua masalah besar di negara yang sedang berkembang, tak terkecuali Indonesia. Pada dasarnya ketimpangan pendapatan tidak dapat dihilangkan, namun hanya bisa dikurangi pada tingkat yang dapat diterima dalam proses pertumbuhannya. Karenanya, ketimpangan itu akan selalu ada, baik di negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi.

Pemerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu faktor kesejahteraan. Menurut Arsyad (2010) tujuan utama dari pembangunan ialah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Adanya ketimpangan pendapatan menyebabkan wilayah yang ketimpangan pendapatannya tinggi dikategorikan miskin, namun tidak dapat dikatakan seluruh penduduknya miskin karena tingginya tingkat ketimpangan pendapatan (Dao,2013).

Adanya disparitas merupakan konsekuensi logis dari sebuah pembangunan dan erat kaitannya dengan pertumbuhan terutama pada negara berkembang, sebab hal ini akan selalu ada dalam proses pembangunan. Konsep "*growth pole*" atau "kutub pertumbuhan" yang diperkenalkan oleh ekonom Prancis, *Francois Perroux*. Pendukung

konsep ini memandang bahwa bagi negara-negara berkembang, perlu melakukan investasi pada sektor industri padat modal di daerah perkotaan yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya mengurangi kesenjangan. Pandangan tersebut mengacu pada teori ekonomi neo-klasik, bahwa pembangunan pada beberapa sektor yang dinamis, akan memberikan rasio output yang tinggi pada wilayah tertentu dan dampak *multiplier effect* bagi sektor-sektor lainnya pada wilayah yang lebih luas. Lebih jauh, Mercado misalnya, mengungkapkan bahwa ketika kesejahteraan di daerah perkotaan tercapai, maka proses *trickel down effect* akan berlangsung dengan sendirinya. Proses ini akan dimulai dari perkotaan lalu mengalir ke daerah-daerah *hinterland* dan pedesaan.

Sumitro Djojohadikusumo selaku arsitek ekonomi Orde Baru juga menerapkan konsep pembangunan ekonomi yang mengarusutamakan pertumbuhan. Dalam pandangannya, ketimpangan pendapatan hanya dapat dikurangi dengan pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan yang terjadi pada masa-masa awal pembangunan adalah konsekuensi logis yang memang harus terjadi. Setelah pertumbuhan yang tinggi dicapai, barulah kemudian ekonomi digerakkan menuju tahap pemerataan melalui mekanisme "*trickle down effect*" dalam wujud re-investasi setelah tabungan yang dimiliki sudah cukup tersedia dengan sangat memadai (Soemitro, 1994)

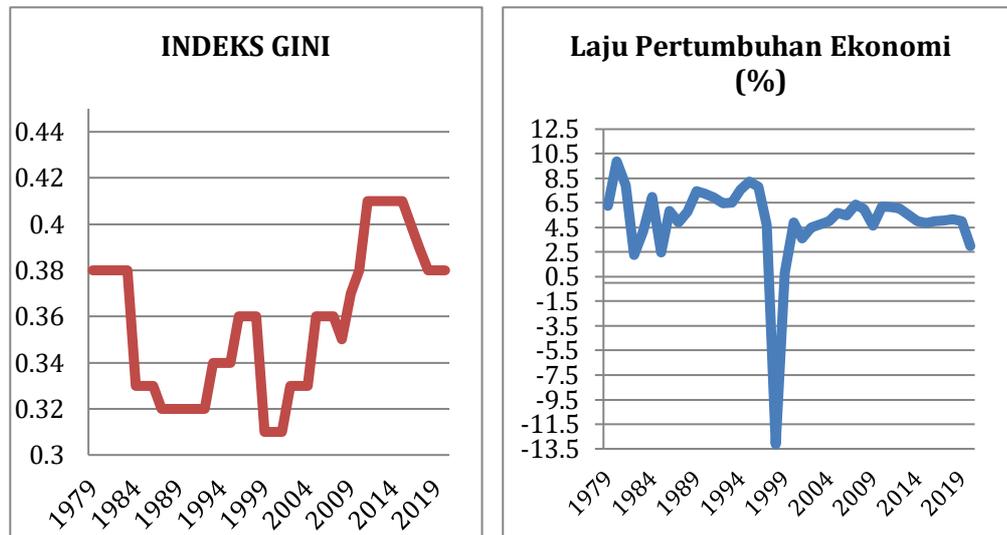
Pandangan Sumitro tersebut tentu tidak sembarang karena memiliki basis akademis yang cukup mumpuni, paling tidak bersandar pada

hipotesis U terbalik Simon Kuznets. Melalui hipotesa itu, Kuznets (1971) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada mulanya dapat meningkatkan ketimpangan. Namun, setelah mencapai kondisi tertentu dalam jangka panjang, pertumbuhan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Sejauh ini, diskursus hubungan pertumbuhan dengan ketimpangan berlangsung sangat dinamis. Terjadi demikian karena hubungan keduanya memang tidak sederhana, sehingga pada tataran empiris sulit dipahami dan selalu menimbulkan kontroversi (Yang dan Greaney, 2017). Beberapa peneliti menemukan hubungan kedua variabel berkorelasi positif dan beberapa lainnya menemukan hubungan yang negatif. Hubungan positif antara lain dikemukakan oleh Lundberg dan Squire (2003); Wahiba dan El Weriemmi (2014). Mereka menyimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan dan atau sebaliknya. Tetapi berbeda bagi Panizza (2002) dan David (2007), yang menemukan hubungan negatif, di mana pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, namun tidak signifikan .

Sesuai dengan kondisi Indonesia, baik pada masa Orde Baru maupun di era reformasi saat ini. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan pada masa Orde Baru (1979 – 1997) cenderung negatif, sementara pada era reformasi (2000 – 2019) cenderung positif, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1

Gambar 1. 1 Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Masa Orde Baru dan Reformasi



(Sumber : World Bank dan Badan Pusat Statistik 2019, data diolah)

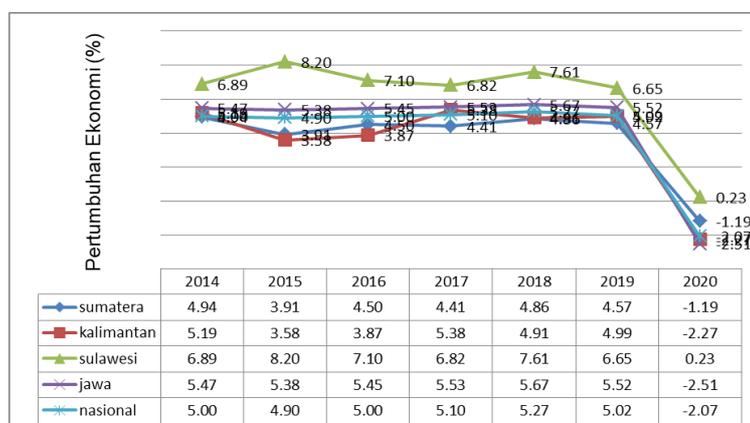
Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi pada periode 1979 – 1997 rata-rata sebesar 6,25%, lebih tinggi dari pada periode 2000 – 2019 sebesar 5,2%. Demikian pula dengan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini. Rata-rata indeks gini periode 1979 – 1997 sebesar 0,34, lebih rendah dari pada periode 2000 – 2019 yang mencapai 0,36. Artinya, pada masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan ketimpangan pendapatan juga lebih rendah. Menariknya, fenomena itu terjadi pada dua era pemerintahan dengan sistem yang berbeda, yaitu, era Orde Baru yang sentralistis dan Era Reformasi.

Kebijakan pembangunan ekonomi pada era Reformasi, dicirikan oleh desentralisasi berbagai kebijakan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Antara lain, kebijakan desentralisasi fiskal yang dimulai pada tahun 2001. Desentralisasi fiskal ini diwujudkan melalui transfer dana

pusat ke daerah berupa dana perimbangan, transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian. Berkat kebijakan ini, ekonomi Indonesia yang terpuruk di masa-masa awal reformasi dengan laju pertumbuhan 0,79% pada tahun 1999, perlahan tumbuh hingga mencapai 5,69% pada tahun 2005.

Apabila dibandingkan wilayah Indonesia bagian barat dan timur, dari segi kontribusi dalam pembentukan PDB kawasan Indonesia bagian barat tetap mendominasi dibandingkan kawasan Indonesia timur. Misalnya saja kontribusi pulau Jawa sejak 1982 hingga tahun 2020 masih di atas angka 50 persen. Pada tahun 1982 pulau Jawa menyumbang 51% persen dan meningkat menjadi 57,55% pada tahun 2020 tanpa mengalami penurunan di bawah angka 50% sedangkan kurang lebih 40 persen disumbangkan oleh lima pulau lainnya. Ketimpangan di kawasan Indonesia timur lebih tinggi dengan rata-rata indeks gini sebesar 0,385, sedangkan Indonesia bagian barat sebesar 0,364 dari tahun 2011 hingga 2017 (Yuniasih, 2019)

Gambar 1. 2 Grafik Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Antarpulau di Indonesia Tahun 2014-2020

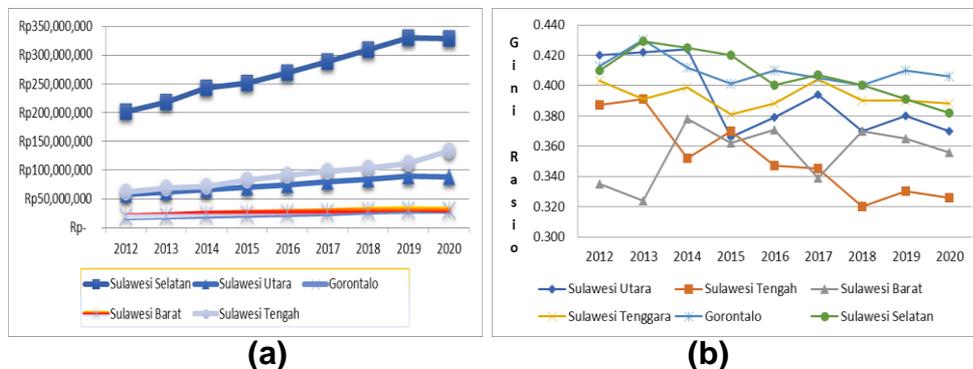


(Sumber : Jurnal Desentralisasi Fiskal Dan Ketimpangan Antar kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan: Implementasi Tujuan Sdg's Ke-10 dan Badan Pusat Statistik 2020, data diolah)

Berdasarkan gambar diatas, Pulau Sulawesi merupakan pulau paling maju dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia dengan rata-rata sebesar 7,61 persen per tahun selama delapan tahun terakhir dari tahun 2012 hingga 2019, sekaligus pulau yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDB dari kawasan Timur Indonesia. Tidak hanya itu, di tahun 2020 saat wabah Covid-19 menyerang, Pulau Sulawesi justru tumbuh di angka 0,23% dibanding pulau Indonesia bagian barat yang mengalami kontraksi.

Hal tersebut tentu tak lepas dari kontribusi Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dalam 16 tahun terakhir tercatat mampu mencapai rata-rata diatas 6 persen. Pada tahun 2012 hingga 2020 Perekonomian Sulawesi Selatan dapat dikatakan cukup baik dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 6.9% dimana angka ini terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai output (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan juga terbesar diantara provinsi-provinsi lain dalam Pulau Sulawesi **(a)**. Meskipun begiu, tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan juga dibarengi dengan ketimpangan pendapatan.

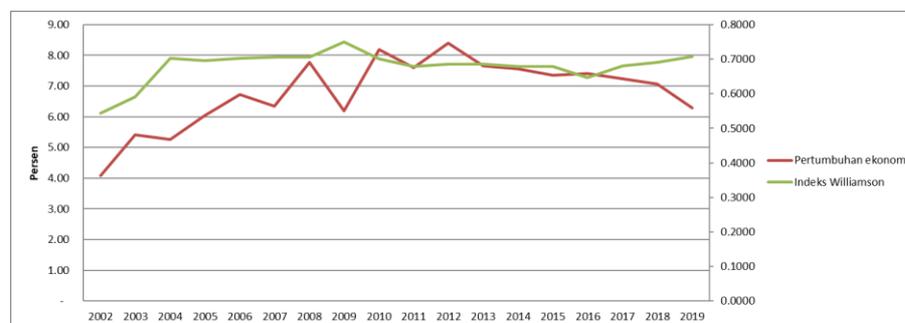
Gambar 1.3 Output (PDRB) Per Provinsi dan Gini Ratio Tiap Provinsi di Pulau Sulawesi 2012-2020



(Sumber : Badan Pusat Statistik 2020, data diolah)

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa indeks gini daerah di pulau Sulawesi cenderung berfluktuatif. Sulawesi selatan termasuk provinsi dengan nilai indeks gini yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sulawesi. Pada tahun 2014-2020 indeks gini Sulawesi Selatan berada di atas 0.400. Pada tahun 2017 indeks ini Sulawesi Selatan berada pada nilai 0.429. Meskipun garis tren Sulawesi Selatan menurun tapi keadaan ini dibarengi dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan 2002-2019



(Sumber : Badan Pusat Statistik 2021, data diolah)

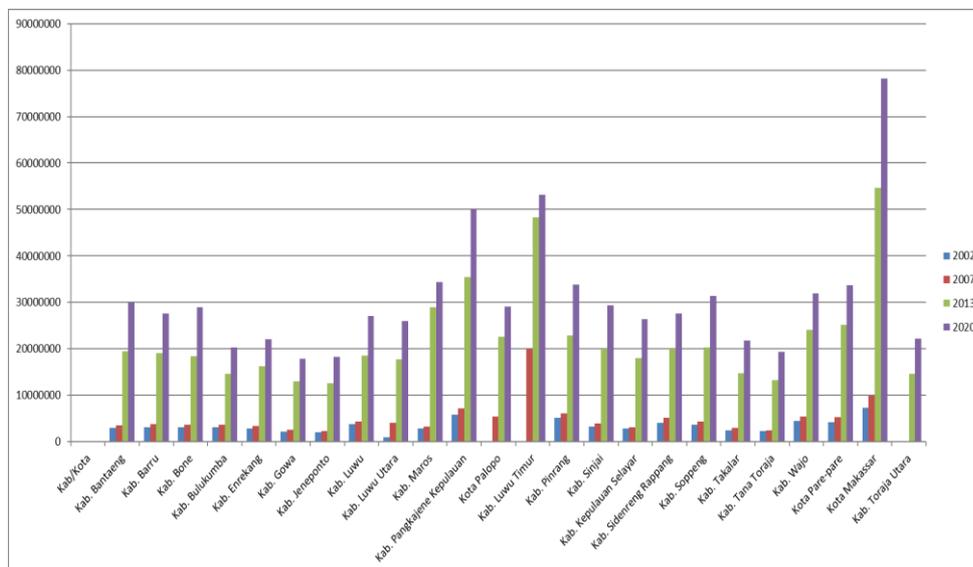
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2002 hanya sebesar 4,08 persen kemudian naik menjadi 6,92 pada tahun 2019. Secara umum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan akan tetapi dari tahun ke tahunnya terjadi peningkatan yang berfluktuasi. Selama 19 tahun terakhir ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Williamson di Sulawesi Selatan pada tahun 2002 sebesar 0,54 dan kemudian naik di tahun 2019 sebesar 0,70. Nilai indeks ini telah mencapai tingkat terjadinya ketimpangan yang tinggi dan selama 19 tahun terakhir ketimpangan yang diukur dengan Indeks Williamson dengan nilai ketimpangan tertinggi pada tahun 2009 sebesar 0,75. Hal ini sebagaimana laju pertumbuhan ekonomi yang pada setiap tahunnya berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan namun berdasarkan data ketimpangannya justru tidak mengalami perbaikan.

Masalah ketimpangan selalu diaktikan dengan pertumbuhan ekonomi, sebab beberapa ekonom mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan penyebab terjadinya ketimpangan. Tingginya sebuah pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan melebar. Tetapi beberapa ekonom lainnya juga mengatakan pertumbuhan ekonomi akan mendorong penurunan ketimpangan pendapatan. Kuznet (1971) mengatakan bahwa di awal pembangunan, ketimpangan akan meningkat sampai pada satu titik dimana terjadi perkembangan teknologi dan industrialisasi maka ketimpangan akan menurun. Hal lain berdasarkan

teori pertumbuhan Neoklasik, Solow (1956) mengemukakan bahwa pertumbuhan dalam jangka panjang akan mengakibatkan konvergensi yang artinya pendapatan perkapita daerah berkembang akan tumbuh lebih cepat dibanding daerah-daerah maju, sehingga ketimpangan akan semakin menipis pada dua daerah tersebut.

Pada grafik di atas, kasus ketimpangan di provinsi Sulawesi Selatan terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tampak berjalan paralel. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat ketimpangan juga ikut meningkat, begitupun sebaliknya. Yang memberikan arti bahwa peningkatan pertumbuhan justru tidak konsisten dalam memberikan efek terhadap penurunan ketimpangan di Sulawesi Selatan.

Gambar 1. 5 Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002, 2007, 2013 dan 2020 (rupiah)



(Sumber: Badan Pusat Statistik 2020, data diolah)

Ketimpangan juga dapat dilihat dalam bentuk perkembangan PDRB perkapita antar Kabupaten/Kota. Dalam Grafik 1.5 di atas menunjukkan telah terjadi semakin timpangnya perbedaan PDRB perkapita antara daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam grafik menggambarkan bahwa PDRB perkapita Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur memiliki jumlah besar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Pada tahun 2002 PDRB per kapita Kota Makassar misalnya yang memiliki PDRB per kapita sebesar Rp 7,2 juta sementara daerah seperti Kabupaten Lumu Utara dan Kabupaten Jeneponto memiliki PDRB per kapita masing-masing sebesar Rp 900 ribu dan Rp 1,9 juta. Kemudian pada tahun 2007 terjadi kenaikan, Kota Makassar memiliki PDRB per kapita naik menjadi Rp 9 juta, sementara Kabupaten Jeneponto memiliki PDRB per kapita naik menjadi Rp 2,2 juta. Pada tahun 2007, Kabupaten Luwu Timur menjadi daerah yang memiliki PDRB per kapita tertinggi di Sulawesi Selatan dengan jumlah PDRB per kapita sebesar 25,08 juta disusul Kota Makassar. Pada tahun 2013, Kota Makassar Kembali menjadi terdepan dalam peringkat PDRB per kapita tertinggi yakni dengan jumlah PDRB sebesar 54,6 juta kemudian Kabupaten Luwu Timur dengan PDRB per kapita sebesar Rp 48,3 juta. Sementara untuk daerah yang paling rendah PDRB per kapitanya masih ditempati oleh Kabupaten Jeneponto yakni dengan jumlah sebesar 12,5 juta dan jumlah ini masih sangat jauh tertinggal dari dua daerah tertinggi jumlah PDRB per kapitanya.

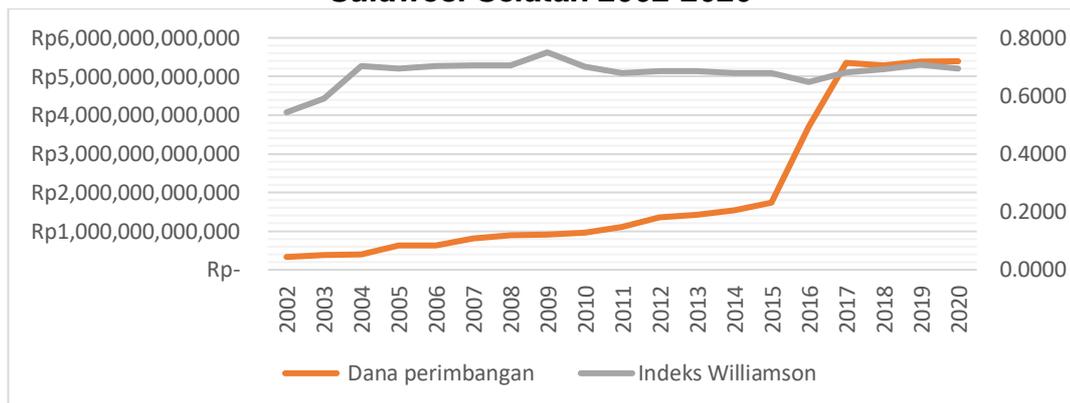
Pada tahun 2020, PDRB per kapita masing-masing daerah melejit. Kota Makassar menjadi daerah yang paling tinggi PDRB per kapitanya sebesar 78 juta rupiah kemudian disusul oleh Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan masing-masing dengan PDRB per kapita sebesar 53,3 juta dan 50 juta. Sementara daerah yang paling kecil PDRB per kapitanya ditempati oleh Kabupaten Gowa dengan PDRB perkapita sebesar 17,8 juta kemudian disusul oleh Kabupaten Jeneponto dengan angka 18,3 juta.

Selain ketimpangan yang semakin melebar yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson serta gambaran PDRB perkapita. Ketimpangan pendapatan antar daerah juga dapat dilihat dari kontribusi daerah dalam pembentukan PDRB Sulawesi Selatan tahun 2020 yang masih dipegang oleh Kota Makassar sebesar 36,71%, Kabupaten Bone 6,70% dan kabupaten Luwu Timur 5,14 % dan 51% disumbang oleh 21 daerah lainnya (BPS, 2020). Di antara 21 daerah tersebut hanya 5 daerah yang kontribusinya diatas 3%. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena struktur prekonomian khususnya Kota Makassar yang umumnya didorong oleh sector tersier yang paling besar menciptakan nilai tambah dibandingkan sector pertanian, juga elastisitas penyerapan tenaga kerja pada sector ini lebih besar.

Diskursus dikalangan ekonom mengenai ketimpangan sangat erat kaitannya dengan persoalan sistem redistribusi sumber daya disetiap wilayah atau daerah yang berbeda-beda. Indonesia sejak tahun 2001

yang telah menerapkan sistem desentralisasi fiskal untuk membantu perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal yang dapat dilihat pada grafik berikut,

Gambar 1. 6 Dana Perimbangan dan Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan 2002-2020

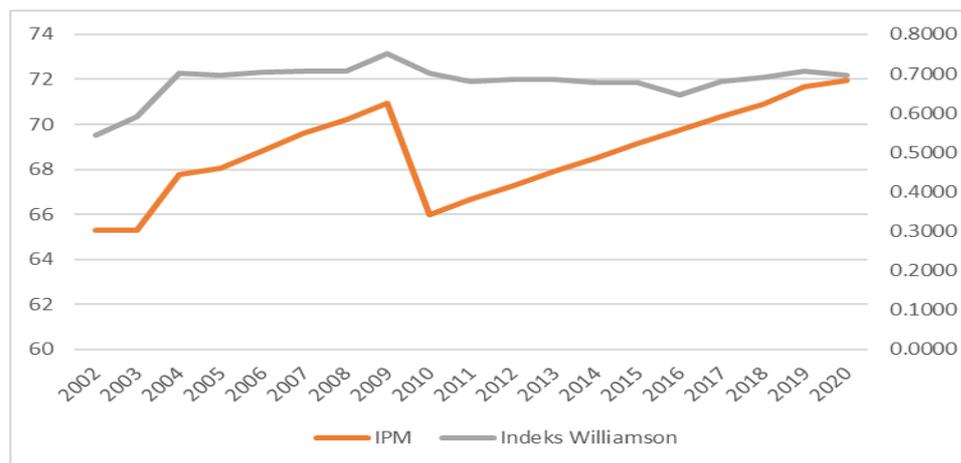


(Sumber : Kemenkeu dan Badan Pusat Statistik 2020, data diolah)

Transfer dari pusat berupa dana perimbangan di Provinsi Sulawesi Selatan secara umum terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya dana perimbangan selain berdampak baik pada perekonomian, namun juga mencerminkan adanya ketergantungan fiskal terhadap dana pusat. Bahkan mayoritas dana di daerah merupakan dana perimbangan yang kurang lebih 80% dari total penerimaan daerah. Dana perimbangan berupa dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil menunjukkan *trend* peningkatan dari tahun ketahun. Selama desentralisasi fiskal pada tahun 2001 dana perimbangan Sulawesi Selatan sebesar Rp328,705,760,000 meningkat ditahun 2020 sebesar Rp5,395,232,629,887. Hal ini sebanding dengan ketimpangan yang meningkat pula pada 19 tahun terakhir.

Adanya dana transfer daerah berupa dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), memungkinkan daerah-daerah otonomi memiliki sumber dana untuk membangun ekonominya masing-masing. Pembangunan itu dapat dikatakan berhasil jika suatu daerah dapat meningkatkan pertumbuhan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Salah satu factor kemajuan sebuah wilayah dapat dilihat salah satunya dari kualitas sumber daya manusia. Melalui Indeks Pembangunan Manusia setiap wilayah tidak hanya melihat kuantitas namun juga dapat melihat kualitas karena IPM merupakan indeks komposit dan merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan *representative*.

Gambar 1. 7 Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan 2002-2020

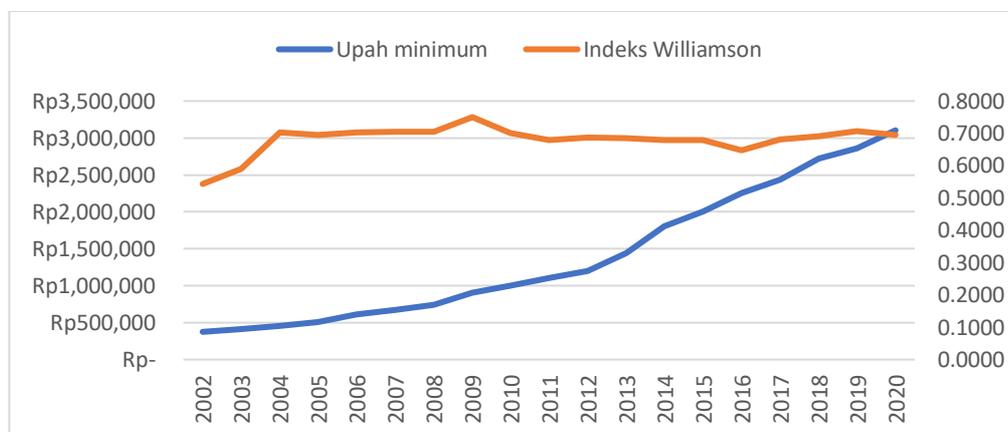


(Sumber : Badan Pusat Statistik 2020, data diolah)

Indeks Pembangunan Manusia provinsi Sulawesi Selatan dalam 19 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2002, IPM Sulawesi Selatan berada pada angka 65,3 dan meningkat sebesar 72 pada tahun

2020. Namun, ketimpangan yang diukur dalam indeks Williamson juga mengalami kenaikan pada tahun 2002 sebesar 0,54 menjadi 0.69 pada tahun 2020. Ironinya meskipun peningkatan kualitas sumber daya manusia terus meningkat dalam 19 tahun terakhir, namun belum mampu mengurangi ketimpangan yang ikut melebar.

Gambar 1. 8 Upah Minimum Provinsi dan Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan 2002-2020



(Sumber : Badan Pusat Statistik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan 2022, data diolah)

Grafik di atas menggambarkan terjadinya kenaikan upah minimum di Sulawesi selatan selama 19 tahun terakhir. Tahun 2002 upah minimum Sulawesi Selatan sebesar 300 ribu, kemudian meningkatn hingga 3,1 juta pada 2020. Sementara itu, ketimpangan yang diukur dengan Indeks Williamson juga mengalami kenaikan selama 19 tahun terakhir. Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong adanya pemerataan pendapatan terhadap masyarakat, namun kenaikan upah disetiap tahunnya juga dibarengi dengan kenaikan ketimpangan pendapatan yang relatif.

Bagi penulis fenomena ini sangat menarik dijadikan topik penelitian untuk penyusunan skripsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir, dengan judul **Analisis Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh alokasi dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002 sampai 2020.
- 2) Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002 sampai 2020.
- 3) Seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002 sampai 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ditetapkan untuk melihat seberapa besar pengaruh;

- 1) Alokasi dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002 sampai 2020.
- 2) Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002 sampai 2020.
- 3) Upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002 sampai 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang ini, yaitu;

- 1) *Pertama*, bagi peneliti secara akademis, penelitian ini dilakukan untuk penyusunan skripsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin, Makassar.

- 2) *Kedua*, untuk memberikan gambaran tentang pengaruh secara langsung dana perimbangan, investasi, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan maupun melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3) *Ketiga*, secara teoritis diharapkan menjadi bahan rujukan yang dapat membantu penelitian terkait selanjutnya.
- 4) *Keempat*, diharapkan dapat menjadi informasi penting yang memberi manfaat praktis bagi para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya di dalam menyusun kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan di satu sisi, serta dapat mengurangi ketimpangan pendapatan pada sisi yang lain.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Teori yang menjelaskan fenomena ketimpangan yakni Teori Kuznet dengan hipotesis U terbaliknya. Teori ini menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah meningkat pada awal fase pembangunan ekonomi dan kemudian menurun seiring proses pembangunan ekonomi.. Menurut Williamson (Sjafrizal, 2008), pada umumnya *Regional Inequalities* cenderung membesar, pada saat terjadinya proses perkembangan.

Pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan di sektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional.

Akan tetapi dalam jangka panjang, pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan dan dengan asumsi mekanisme pasar bebas serta mobilitas semua faktor-faktor produksi antar negara tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan output antar negara akan cenderung mengecil bersamaan

dengan tingkat pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan rata-rata yang semakin tinggi di setiap negara, yang pada akhirnya menghilangkan kesenjangan.

Mubyarto (1995) membedakan ketimpangan menjadi 3 kategori : (1) Kesenjangan antar sektor, yaitu sektor pertanian dan industri; (2) Kesenjangan antar daerah; dan (3) Ketimpangan antar golongan. Kesenjangan jenis ini adalah yang paling berat dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal, di mana perekonomian tumbuh terlalu cepat dan mengakibatkan kesenjangan semakin parah. Kategori terakhir, senada dengan Baldwin (1986), bahwa ketimpangan pendapatan diartikan sebagai perbedaan tingkat kemakmuran ekonomi antara orang kaya dan orang miskin yang dicerminkan oleh perbedaan pendapatan.

Ketimpangan mengacu pada standar hidup masyarakat yang disebabkan oleh kesenjangan antara wilayah, yaitu, adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang dimiliki. Perbedaan menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan berbeda-beda pada setiap wilayah, sehingga terjadi kesenjangan kesejahteraan di wilayah bersangkutan (Kuncoro, 2003).

Ketimpangan pendapatan juga dapat terjadi karena ketimpangan ekonomi antar wilayah. Menurut Syafrizal (2008) bahwa ketimpangan antar wilayah merupakan hal umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah yang disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang dimiliki masing-masing daerah.

Perbedaan ini membuat kemampuan masing-masing daerah mendorong proses pembangunan, juga berbeda. Oleh karena itu, tidak heran kalau muncul wilayah maju dan tertinggal di suatu daerah yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

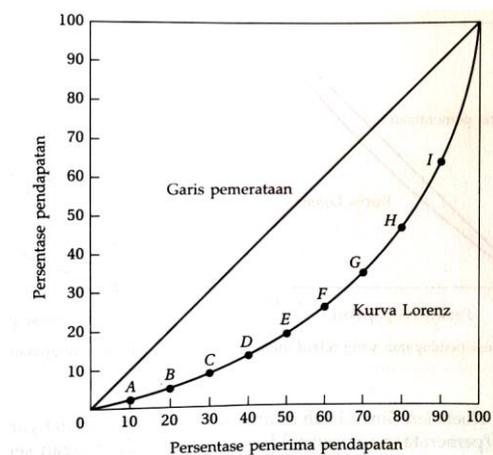
Aldeman dan Morris dalam Damanik dkk (2018) mengemukakan bahwa ada 8 faktor penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yaitu : (1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita. (2) Inflasi : terjadi karena pendapatan uang bertambah, namun tidak diikuti pertambahan produksi barang-barang secara proporsional. (3) Ketidakmerataan pembangaunan antar daerah. (4) Investasi lebih berorientasi pada proyek-proyek padat modal. (5) Mobilitas sosial rendah. (6) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri. (7) Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor dari negara sedang berkembang. (8) Hancurnya industri kerajinan rakyat, seperti, pertukangan, industri rumah tangga, dan lainnya.

Menurut Todaro dan Smith (2006), ada beberapa cara yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan, antara lain :

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi pada distribusi pendapatan masyarakat. Kurva ini memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara presentase penerima pendapatan total yang benar-benar diterima selama periode tertentu, misalnya, 1 tahun. Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi empat yang memiliki garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Garis horizontal menunjukkan persentase penerima pendapatan (penduduk), garis vertikal adalah persentase pendapatan, garis diagonal dianggap sebagai garis pemerata sempurna. Semakin dekat jarak Kurva Lorenz dari garis diagonal, berarti ketimpangan pendapatan semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin jauh jarak Kurva Lorenz dari garis diagonal, menunjukkan kondisi ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Gambar 2. 1 Kurva Lorenz



b. Indeks Gini (IG)

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang nilainya berkisar antara 0–1. Semakin Indeks Gini mendekati nilai 0 (pemerataan sempurna), ketimpangan pendapatan semakin rendah. Sebaliknya, semakin Indeks Gini mendekati nilai 1 (ketimpangan sempurna), menunjukkan ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Oleh karena itu, nilai Indeks Gini lebih besar dari pada 0 dan lebih kecil dari pada 1. Pada prakteknya, Todaro dan Smith (2006) menggolongkan negara-negara berdasarkan derajat ketimpangannya, yaitu : 0,50 – 0,70, ketimpangan tinggi; 0,20 – 0,35, relatif merata; dan, IG mendekati 0,40 disebut sangat timpang.

c. Indeks Williamson (CV)

Indeks Williamson merupakan ukuran disparitas pendapatan antar daerah/wilayah yang dikembangkan oleh Joeffrey G Williamson pada tahun 1965. Menurut Williamson, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi yang lebih maju maka keseimbangan antar daerah dan disparitas akan berkurang dengan signifikan. Jika indeks gini menghitung nilai distribusi pendapatan seluruh rumah tangga dalam suatu daerah atau negara, Indeks Williamson justru dapat melihat besarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah dalam suatu wilayah. Indeks Williamson juga dapat digunakan untuk melihat ketimpangan antar kabupaten atau kota di suatu provinsi (Sjafrizal, 2008)

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \frac{P_i}{P}}}{\bar{y}},$$

Keterangan :

CV = Indeks ketimpangan pendapatan wilayah

y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota ke-i (rupiah)

\bar{y} = Rata-rata PDRB per kapita provinsi (rupiah)

P_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke-i (jiwa)

P = Jumlah penduduk (jiwa)

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Tulus Tambunan (2003) adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan, jika jumlah barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari produk domestik bruto (PDB). Nilai PDB ini digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Sejalan dengan itu, Sadono Sukirno (2002) menjelaskan bahwa ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun ketahun. Indikator ini menunjukkan sejauh

mana kegiatan perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau masyarakat sejahtera pada suatu periode tertentu. Perkembangan kegiatan dalam perekonomian menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Oleh karena itu, masalah pertumbuhan ekonomi ini dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Sebab, perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.

Simon Kuznets dalam Todaro dan Smith (2006), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari sebuah negara terkait kemampuannya menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas ini ditentukan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, dan ideologi. Kenaikan output secara berkesinambungan akan mengantarkan sebuah negara mencapai kematangan ekonomi (*economic maturity*), ketika sudah memiliki kemampuan menyediakan berbagai barang-barang kebutuhan penduduknya.

Sedangkan Schumpeter dalam Budiono (2002) yang memaknai pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat secara konsisten

dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengatasi ketimpangan sosial ekonomi, guna mempercepat perubahan struktur perekonomian menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis.

Todaro dan Smith (2006) menulis bahwa pasca Perang Dunia Kedua, model-model pembangunan ekonomi didominasi oleh empat aliran pemikiran: (1) model pertumbuhan tahapan linier (*linier stage of growth models*); (2) teori dan pola perubahan struktural (*theories and patterns of structural change*); (3) revolusi ketergantungan internasional (*the international dependence revolution*); serta (4) kontrarevolusi pasar bebas neoklasik (*the neoclassical free market counterrevolution*). Untuk kepentingan penulisan skripsi ini, penulis hanya memilih beberapa konsep yang dinilai relevan.

Model pertumbuhan tahapan linier muncul pada dekade 1950-an dan 1960-an yang dipicu oleh politik perang dingin. Model ini diperkenalkan oleh Walt W. Rostow. Menurut Rostow, perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan dalam lima tahapan pertumbuhan yang harus dilalui semua negara. Kelima tahapan itu dimulai dari tahapan masyarakat tradisional, tahapan pertumbuhan pra-tinggal landas, tahapan tinggal landas, tahapan menuju kematangan ekonomi, dan tahapan konsumsi massal yang tinggi. Namun Rostow mensyaratkan bahwa kelima tahapan ini hanya bisa dilalui dengan pertumbuhan

ekonomi yang berkesinambungan dengan pengerahan atau mobilisasi dana tabungan dalam jumlah yang memadai untuk melakukan investasi.

Menurut teori ini, negara-negara maju seluruhnya sudah melampaui tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang berlangsung secara otomatis. Sedangkan negara-negara berkembang atau yang masih terbelakang, pada umumnya masih berada pada tahapan masyarakat tradisional atau pra-tinggal landas. Negara semacam ini tinggal merumuskan serangkaian kebijakan pembangunan untuk tinggal landas, kemudian bergerak menuju proses pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan. Rostow berkeyakinan bahwa kunci utama memacu pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan adalah melalui peningkatan total tabungan nasional dan investasi.

Todaro dan Smith (2006) lebih lanjut menulis bahwa mekanisme perekonomian yang mengandalkan peningkatan investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju tahapan tinggal landas, dijelaskan melalui model pertumbuhan Harrod-Domas (*Harrod-Domas growth model*), atau yang sekarang dikenal dengan nama model AK. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi menurut Harrod – Domas, dibutuhkan investasi yang merupakan tambahan neto terhadap stok modal (*capital stock*), dengan asumsi bahwa ada hubungan ekonomi langsung antara besarnya total stok modal (K) dengan GDP total (Y). Hubungan ini dikenal dalam Ilmu Ekonomi sebagai *rasio modal – output* (*capital – output ratio*). Misalkan, jika dibutuhkan modal sebesar US\$ 3

untuk menghasilkan US\$ 1 dari GDP, maka setiap tambahan neto terhadap stok modal dalam bentuk investasi baru, akan menghasilkan kenaikan output nasional atau GDP.

2.1.3 Dana Perimbangan

Menurut Hastuti (2018) bahwa salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Sedangkan desentralisasi fiskal menurut Prawirosetoto dalam Pujiati (2006), adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*).

Sedangkan Saragih (2003) menulis bahwa desentralisasi fiskal dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa . Dengan kata lain, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai sebuah proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi

fiskal berupa Transfer Dana Perimbangan, dana Otonomi khusus, dan Dana Penyesuaian. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Ditjen Perimbangan Keuangan, menjelaskan dalam *website*-nya bahwa Transfer Dana Perimbangan meliputi : (1) Transfer Dana Bagi Hasil Pajak; (2) Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam; (3) Transfer Dana Alokasi Umum; dan (4) Transfer Dana Alokasi Khusus.

- 1) Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, meliputi; (i) DBH Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan; (ii) Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan, adalah bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan Pajak penghasilan. (iii) Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau, adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
- 2) Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) , terdiri atas lima jenis, yaitu : (i) DBH SDA Kehutanan merupakan bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan; (ii) DBH SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minyak dan Gas Bumi; (iii) DBH SDA Mineral dan Batu Bara (Minerba) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan SDA

Minerba yang berasal dari Iuran Tetap (Land-Rent) dan iuran eksploitasi/eksplorasi (royalti); (iv) DBH SDA Panas Bumi merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Panas Bumi yang berasal dari Setoran Bagian Pemerintah atau Iuran Tetap dan Iuran Produksi; (v) DBH SDA Perikanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Perikanan. Masing-masing penerimaan dari kelima SDA tersebut dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- 3) Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 4) Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat IPM merupakan indeks komposit yang merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif.

United Nation Development Programme memperkenalkan IPM pertama kali pada tahun 1990. UNDP mendefinisikan bahwa pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk yang dalam hal ini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan manusia dipandang sebagai sarana untuk menciptakan taraf hidup manusia kearah yang lebih baik. Majunya perekonomian setiap penduduk di suatu negara menunjukkan kehidupan yang lebih baik.

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran yang menggambarkan apakah sebuah kebijakan ekonomi sebuah negara berpengaruh atau tidak terhadap kualitas hidup warga negara. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia tidak hanya bertumpuh pada peningkatan ekonomi semata, namun diperlukannya pembangunan dari segala aspek (Ardiyansyah dan Widiyaningsih, 2014)

Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia itulah yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. $IPM < 60$ (rendah)
2. $60 \leq IPM < 70$ (sedang/menengah)
3. $70 \leq IPM < 80$ (tinggi)

4. IPM \geq 80 (sangat tinggi)

2.1.5 Upah Minimum

Secara sederhana, upah dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam proses produksi. Seperti dikemukakan oleh Benham dalam Rahmat Basman (2021), bahwa upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 30 menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, juga disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk maksud tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan tersebut meliputi : (a) Upah Minimum; (b) Upah Kerja Lembur; (c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; (d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan di luar pekerjaannya; (e) Upah karena menjalankan hak waktu

istirahat kerjanya; (f) Bentuk dan cara pembayaran upah; (g) Denda dan potongan upah; (h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; (i) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; (j) Upah untuk pembayaran pesangon; dan (k) Upah dan perhitungan pajak penghasilan.

Dalam kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar bagi pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya (Asyhadie, 2007). Oleh karena itu jenis upah ini ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota), sehingga disebut Upah Minimum Regional (UMR).

Namun, semenjak berlakunya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, maka penggunaan istilah UMR sudah tidak berlaku lagi. UMR provinsi diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), sedangkan UMR kabupaten/kota diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Perubahan UMK, baik provinsi maupun kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur. Hanya saja, pembahasan UMK kabupaten/kota dilakukan atas usulan bupati atau walikota

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pemerintah, dalam hal ini gubernur, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian diatur dengan peraturan pemerintah (Rusli, 2011).

Setiap tahun, UMK kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum, yaitu : (a) untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai sub-sistem dalam suatu hubungan kerja; (b) untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan; (c) untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan; (d) untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan; dan, (e) mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal (Asyhadie, 2007).

2.2 Tinjauan Teoritis

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai teori dan hubungan antara variabel independen (Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum) terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Kota Makassar).

2.2.1 Hubungan Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi

Dana Perimbangan direpresentasikan oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan Sumber Daya Alam. Dana ini diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dalam rangka implementasi desentralisasi fiskal, sesuai amanat Undang-Undang sekaligus berfungsi sebagai penyeimbangan keuangan antar daerah dan peningkatan pembangunan.

Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan adalah untuk pemerataan kemampuan fiskal tiap daerah serta mengurangi tingkat ketimpangan fiskal baik secara horizontal antar pemerintah daerah sebagaimana kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun vertikal antara pemerintah pusat dan daerah yang merupakan kebijakan mekanisme bagi hasil SDA dan pajak. Disamping itu dalam meningkatkan penyediaan barang publik pemberian Dana Alokasi Khusus memiliki tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Elmi (dalam Tarigan, 2012), secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah:

1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian "*kue nasional*", baik vertikal maupun horizontal.
2. Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah

dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Dalam perspektif peningkatan pemerataan pendapatan maka perananan dana perimbangan sangat penting untuk mempercepat konvergensi antar daerah. Dengan begitu, maka secara teoritis, Dana Perimbangan memiliki kontribusi terhadap kondisi perekonomian di daerah (Sugarti, 2015).

Meningkatnya penerimaan daerah melalui pemberian dana perimbangan dan pengumpulan dana non perimbangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan daerah akan memberikan keleluasaan untuk mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggaran daerah untuk investasi akan meningkatkan kapital stok daerah dan memperluas kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Sugiarti, 2015)

2.2.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan Pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi

Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Menurut Becker (dalam Tri Hartini 2017), menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap

ketimpangan. Saat dikaji lebih dalam mengenai pendidikan formal untuk menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula.

Indeks Pembangunan Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan prekonomian modern, diaman pembangunan manusia yang baik dan berkualitas akan menjadikan factor produksi mampu dimaksimalkan secara optimal. Kualitas penduduk juga akan berinovasi untuk pengembangan faktor produksi yang ada. Sehingga mempermudah peningkatan pertumbuhan ekonomi. (Sukirno, 2006)

Selain itu, sesuai dengan teori *human capital*, bahwa Pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi ketimpangan. Pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk akan ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap penduduk memiliki pendapatan karena Pendidikan yang lebih tinggi maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang secara tidak langsung dapat mengurangi ketimpangan.

2.2.3 Hubungan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi

Dalam teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja terhadap para pengusaha (Sukirno, 2002). Ketimpangan pendapatan tidak lain

merupakan distribusi yang tidak merata dari pendapatan rumah tangga atau pendapatan setiap individu dalam suatu perekonomian. Secara teori, ekonom berpendapat bahwa upah minimum mengurangi ketimpangan sebab upah minimum meredistribusi pendapatan dengan menurunkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah (Levitan & Belous dalam Juliana 2019). Dengan menetapkan upah minimum maka standar dari upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu daerah. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi suatu barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dari PDRB, tanpa memandang bahwa kenaikan yang lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi pemerintah melihat perkembangan sektor ekonomi pembentuk PDRB. Menurut Sukirno menjelaskan bahwa PDRB adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi. (Sukirno, 2002).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peningkatan upah minimum di daerah, apabila upah minimum meningkat maka secara tidak langsung membuat kenaikan harga-harga dipasaran. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Dalam penetapan upah minimum pihak Pemerintah akan mempertimbangkan faktor PDRB dalam proses penetapan upah minimum. Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan output PDRB maka upah minimum selanjutnya ditingkatkan.

2.2.4 Hubungan Pertumbuhan dengan Ketimpangan Pendapatan

Isu mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, sudah lebih dari lima dekade menjadi bahan perdebatan di kalangan para ekonom di seluruh dunia. Secara teoritis, sejumlah peneliti menemukan hubungan keduanya memiliki korelasi positif, tapi ada pula yang negatif. Ada yang menemukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, tetapi ada juga sebaliknya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat tercapainya sebuah pembangunan ekonomi, namun hal yang perlu diperhatikan dalam melihat adanya pertumbuhan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, tetapi melihat kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan tersebut. Apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika sebagian kecil orang yang menikmati

maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu menurunkan angka kemiskinan dan memperkecil ketimpangan. Begitupun sebaliknya jika sebagian besar masyarakat yang turut andil dalam peningkatan pembangunan ekonomi yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil, (Todaro, 2003).

Salah satu analisis yang menarik mengenai hubungan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi adalah hipotesis yang diajukan Kuznetz (1971). Kuznetz menemukan hubungan antara tingkat pendapatan dan distribusi pendapatan berbentuk U terbalik. Menurutnya, pada masa-masa awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk karena proses urbanisasi dan industrialisasi. Namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan atau ketimpangan pendapatan akan mengalami perbaikan, yaitu pada saat sektor-sektor ekonomi di daerah perkotaan sudah mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja yang berasal dari pedesaan (Todaro dan Smith, 2006).

2.3 Hasil Penelitian dan Studi Empiris

Yuni Sugiarti (2015) Meneliti Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar kabupaten/kota, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan Alokasi Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Ekonomi Regional antar kabupaten/kota, serta

untuk mengetahui pengelompokan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, Indeks Williamson dan Tipologi Klassen. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Alokasi Dana Perimbangan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Regional Provinsi Kalimantan Timur, bahwa alokasi dana perimbangan cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan.

Adhitya wardhana dkk (2013) meneliti dampak Transfer Pemerintah Pusat terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. penelitian ini mencoba untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia melalui instrumen fiskal seperti DAU dan DAK. Periode penelitian tahun 2001-2010 menggunakan regresi panel data. Hasil yang estimasi yang didapat yaitu DAU, DAK, infrastruktur jalan, aturan hold harmless dan jumlah penduduk mempengaruhi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain melihat hasil estimasi dari persamaan ketimpangan pendapatan, penelitian ini akan melihat perkembangan ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia dengan menggunakan Indeks Williamson

Nita Tri Hartini (2017) meneliti Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita, investasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2011-2015. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan analisis data panel dengan regresi *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Ni Putu Sri dan I Ketut Sustrina (2017) meneliti Pengaruh IPM dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh IPM dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan (3) menganalisis pengaruh tidak langsung IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan jumlah pengamatan 45 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Aswar (2018) meneliti dalam tesisnya mengenai analisis ketimpangan wilayah di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002-2016. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh langsung dan tidak langsung rasio belanja daerah terhadap total belanja, rasio Panjang jalan terhadap luas wilayah, dan rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2016. Metode ini menggunakan

Indeks Williamson dan SEM untuk mengukur variable yang ada. Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah secara langsung dan tidak langsung.

Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, dan Muhammad Nasir (2015) meneliti pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk menunjukkan hubungan dan pengaruh upah minimum terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* dan *autoregressive*. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel dalam penelitian ini secara signifikan memiliki hubungan yang positif, yang artinya, peningkatan upah minimum akan menaikkan angka kesenjangan pendapatan atau memperbesar kesenjangan pendapatan.

Istikharoh, Whinarko, Rian Destiningsih (2018) meneliti Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada pengaruh secara parsial antara tingkat pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tahun 2008-2018 dan pengaruh secara simultan antara variabel tingkat pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran di D.I Yogyakarta tahun 2008-2018. Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel dengan pendekatan *common effect model*. Hasil

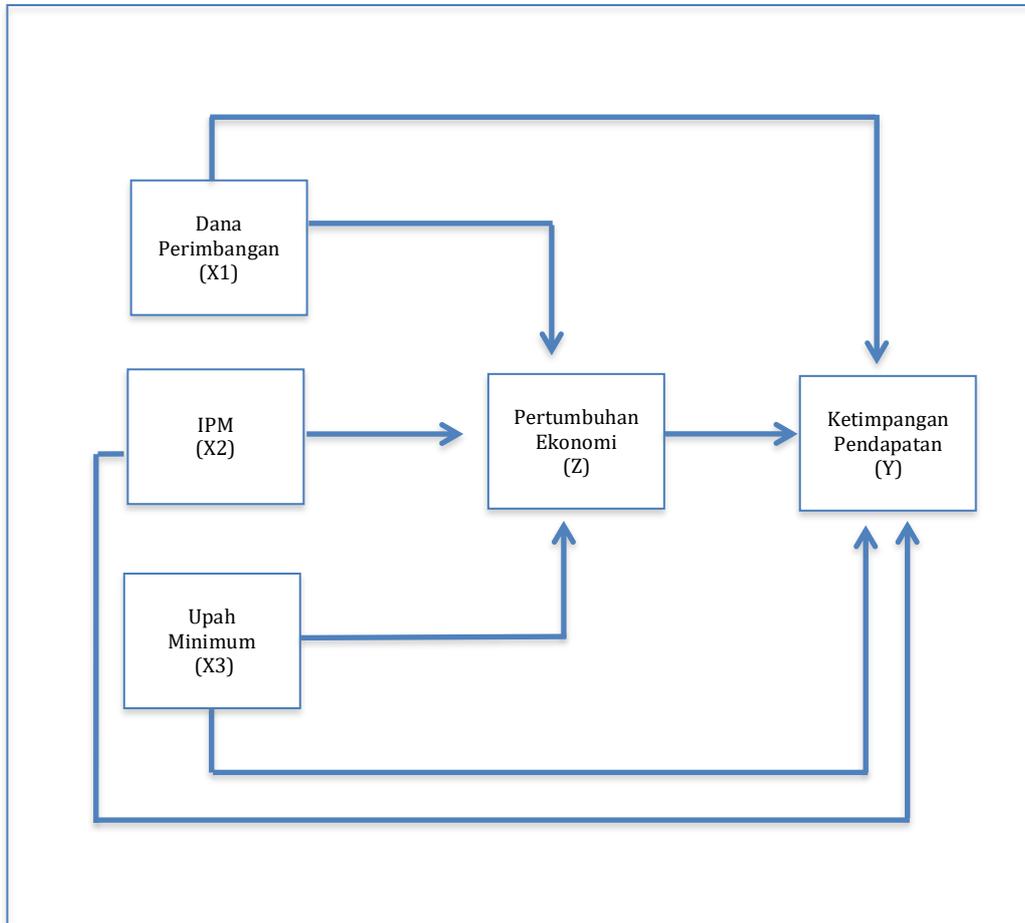
penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan tingkat pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tahun 2008-2018.

Sartina (2016) meneliti pengaruh inflasi dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi serta upah minimum kota terhadap pengangguran di Kota Tarakan. Tujuan penelitian antara lain untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan. Dengan menggunakan metode analisis regresi berganda, Sartina menemukan bahwa upah minimum Kota Tarakan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian analisis pengaruh alokasi dana perimbangan, investasi, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi selatan ini mengangkat variabel yang telah disebutkan dalam judul bahwa ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah (1) Dana Perimbangan, (2) Indeks Pembangunan Manusia, (3) Upah Minimum. Variabel tersebut digunakan oleh peneliti agar terarah dalam menemukan informasi dan data terkait dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Berikut kerangka konseptual penelitian yang disajikan dalam diagram;

Gambar 2. 2 Kerangka Konsep Penelitian



2.5 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan kerangka pikir penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini :

1. Diduga bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung, maupun melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2020.
2. Diduga bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan baik secara

langsung, maupun melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2020.

3. Diduga bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung, maupun melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2020.